

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Praktek pinjam meminjam antara pihak kekurangan dana / *Defisit Spending Unit* (DSU) dan pihak kelebihan dana / *Surplus Spending Unit* (SSU) telah berlangsung selama ribuan tahun. Praktek pinjam meminjam ini bertujuan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan sumber dana baik untuk kegiatan produksi ataupun konsumsi. Dahulu pihak DSU meminjam uang untuk kebutuhan hidup mereka secara langsung kepada pihak SSU tanpa adanya lembaga keuangan yang berperan sebagai lembaga intermediasi.

Lembaga keuangan adalah suatu badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan guna menghimpun dana, menyalurkan dana, atau keduanya. Aset utama dari lembaga keuangan dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (*claims*) dibandingkan aset *non financial* atau aset riil. Lembaga keuangan yang terdapat di Indonesia adalah lembaga keuangan bank (perbankan), dan lembaga keuangan bukan bank.

Lembaga keuangan bank (perbankan) adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dalam simpanan, dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat atau sektor lain dalam bentuk pinjaman.

Lembaga keuangan bank dibagi menjadi empat, yaitu bank sentral, bank umum (bank konvensional), bank perkreditan rakyat (BPR) dan bank syariah.

Bank konvensional melaksanakan kegiatan usahanya menggunakan prinsip konvensional dengan dua metode yaitu (1) menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan maupun pinjaman, dan (2) menerapkan berbagai biaya untuk jasa perbankan dalam nominal atau prosentase tertentu yang disebut *fee based*.

Perbankan konvensional di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Hindia Belanda, yang pada saat itu perbankan konvensional melakukan fungsinya sebagai pemberi jasa lalu lintas pembayaran guna mempermudah pembelian hasil bumi dalam negeri dan penjualan ke luar negeri. Pada masa orde baru perbankan konvensional di Indonesia melakukan kegiatannya dibidang permodalan dan penyediaan dana untuk usaha masyarakat guna pembangunan ekonomi negara.

Seiring berjalannya waktu tingkat kebutuhan masyarakat akan sumber dana yang menunjang kegiatan usahanya atau kegiatan konsumsi akan semakin meningkat. Dalam upaya meningkatkan taraf dan standar hidupnya, masyarakat akan melakukan berbagai usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Lembaga perbankan salah satu alternatif pendanaan yang ada di Indonesia, oleh sebab itu peran lembaga perbankan sangat penting untuk menjadi perantara antara pihak SSU dan pihak DSU sehingga memenuhi kepentingan semua pihak.

Menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa pengertian bank adalah: “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”¹

Sedangkan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 menyimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu “menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.”²

Dalam menjalankan fungsi sebagai penyalur dana, bank melakukan penyaluran kredit kepada pihak penerima kredit (debitur) dengan dikenakan jasa atas peminjaman kredit dalam bentuk bunga kredit tergantung jenis kredit yang disalurkan. Jenis kredit yang ditawarkan meliputi kredit investasi dan kredit modal kerja apabila ditinjau dari segi penggunaan kredit.

Kenaikan pertumbuhan penyaluran kredit merupakan salah satu faktor penting dalam kenaikan pertumbuhan ekonomi dinegara tersebut. Menurut Agustiyanti selaku *investor daily* mengemukakan bahwa

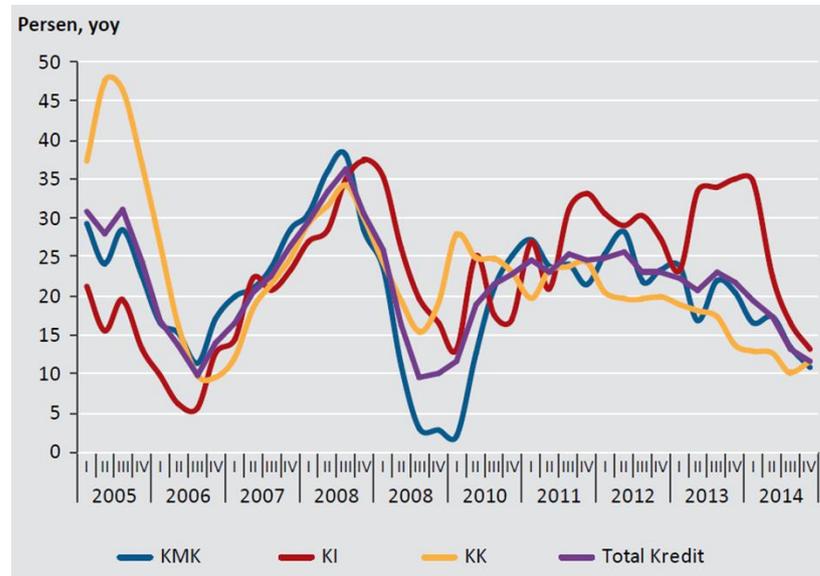
“Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan pada sepanjang tahun lalu sebesar Rp4.170,7 Triliun atau hanya tumbuh 11,4 persen (yoy), jauh melambat dibandingkan 2013 lalu sebesar 21,4 persen (yoy) dan target awal Bank Indonesia sebesar 15-17 persen.”³

¹ Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992

² Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

³ Agustiyanti/ FER, *BI: Penyaluran Kredit Hanya Tumbuh 11,4% di 2014*, 2015, Beritasatu, (<http://www.beritasatu.com/ekonomi/246491-bi-penyalaran-kredit-hanya-tumbuh-114-di-2014.html> diakses tanggal 4 Februari 2015)

Pergerakan penyaluran kredit perbankan konvensional periode 2005-2014 (posisi Desember) dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut :



Sumber : Laporan Publikasi Bank Indonesia, data diolah tahun 2015

Gambar 1.1

Pergerakan Penyaluran Kredit periode 2005-2014

Berdasarkan jenis penggunaannya, pertumbuhan kredit produktif melambat sepanjang tahun 2014, namun masih lebih tinggi dibandingkan dengan kredit konsumsi. Hal ini tercermin dari pertumbuhan Kredit Modal Kerja (KMK) yang melambat menjadi 10,8% pada tahun 2014 dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 20,4%. Sementara itu, perlambatan Kredit Investasi (KI) tercatat lebih dalam menjadi 13,2% dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 35,0%. Hal ini disebabkan oleh nilai tukar rupiah yang mengalami depresiasi.

Dalam kegiatan penyaluran kredit, bank memperoleh dana untuk disalurkan kepada debitur melalui kegiatan penghimpunan dana, seperti giro, deposito, tabungan, dan bentuk lainnya dari pihak ketiga. Dana tersebut

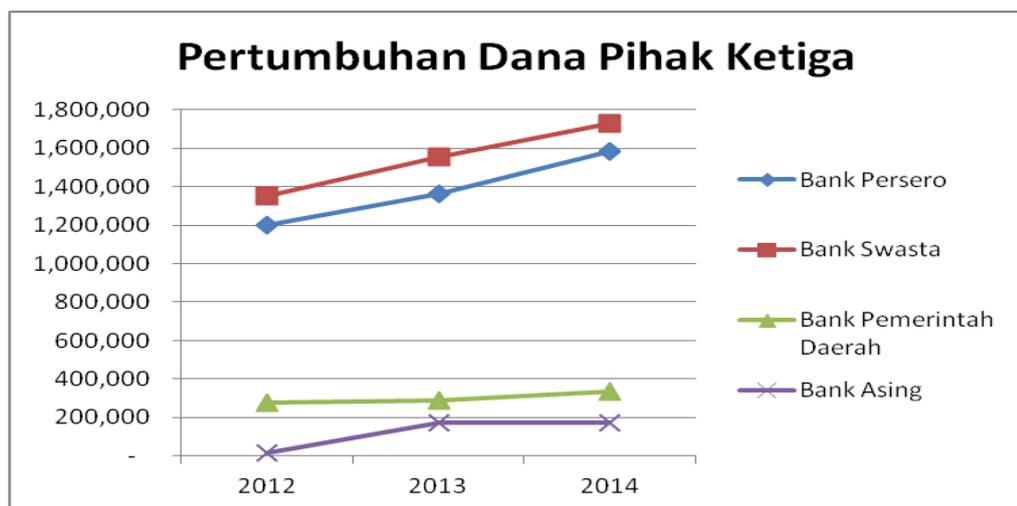
memiliki kontribusi dan merupakan sumber dana terbesar yang dapat diandalkan dan memengaruhi kemampuan bank dalam menyalurkan kepada debitur.

Komposisi Dana Pihak Ketiga perbankan nasional periode 2012-2014 (posisi Desember) dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Jumlah DPK Perbankan Nasional Periode 2012-2014 (posisi Desember)

Keterangan	Jumlah Dana Pihak Ketiga (dalam milyar Rp)		
	2012	2013	2014
Bank Persero	1.201.284	1.363.062	1.582.488
Bank Swasta	1.353.149	1.552.385	1.731.019
Bank Pemerintah Daerah	278.535	287.709	335.957
Bank Asing	155.430	173.395	174.261
Total	2.988.398	3.376.551	3.823.725

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia, data diolah tahun 2015



Gambar 1.2

Pergerakan DPK Perbankan Nasional periode 2012-2014 (posisi Desember)

Melihat dari grafik di atas, pertumbuhan DPK meningkat setiap tahunnya. Tercatat untuk DPK perbankan nasional tahun 2012 sebesar

2.988.398 (dalam milyar) kemudian meningkat pada tahun 2013 sebesar 388.153 (dalam milyar) sehingga pertumbuhan DPK perbankan nasional menjadi 3.376.551 (dalam milyar). Kemudian meningkat kembali pada tahun 2014 sebesar 447.174 (dalam milyar), sehingga pertumbuhan DPK perbankan nasional tercatat di angka 3.823.725 (dalam milyar).

Data tersebut dapat menjadi gambaran bahwa masyarakat mengalami pertumbuhan ekonomi yang baik, dan dapat dikatakan bahwa pihak SSU mempercayakan dana lebih yang mereka miliki dengan cara menginvestasikannya pada lembaga intermediasi guna memberikan pinjaman berupa kredit pada pihak DSU.

Dana pihak ketiga merupakan kontribusi besar suatu bank dalam menyalurkan kredit, bunga simpanan yang menjadi beban bank diharapkan lebih kecil jika dibandingkan dengan pendapatan bunga kredit yang diperoleh bank. Hal ini menyebabkan pertumbuhan dana pihak ketiga sesuai dengan pertumbuhan penyaluran kredit.

Dalam dunia perdagangan sering terjadi risiko kegagalan yang terjadi, demikian juga pada dunia perbankan. Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank dapat mengandung risiko berupa tidak lancarnya pembayaran kredit atau yang biasa disebut dengan kredit bermasalah / *non performing loan* (NPL). Kredit bermasalah dalam hal ini adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.

NPL merupakan indikator dari manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah, semakin tinggi NPL maka akan semakin buruk kualitas kredit

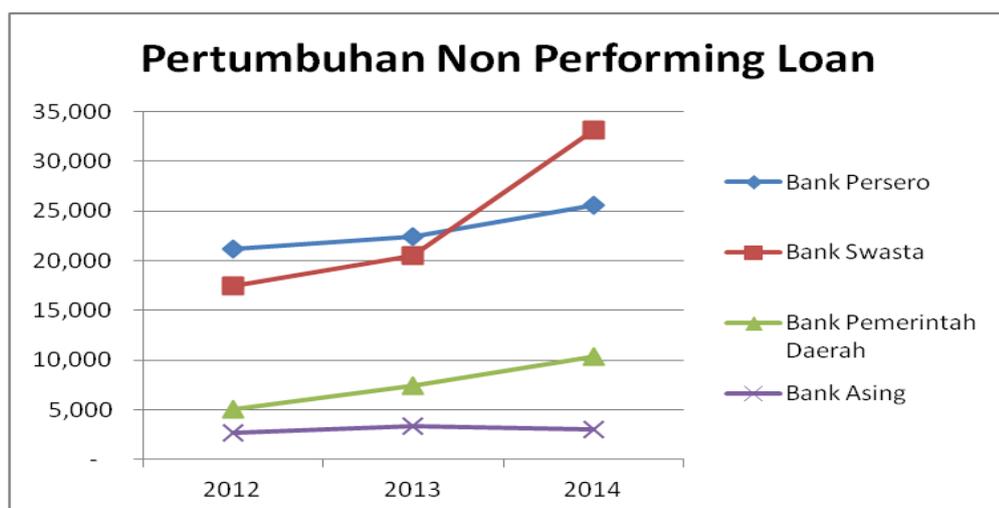
yang diberikan oleh bank, dan bank tersebut dalam kondisi bermasalah, sehingga penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank perlu ditinjau ulang. Semakin rendah NPL maka, akan semakin baik kualitas kredit yang diberikan oleh bank dan bank tersebut dalam kondisi yang sehat, sehingga penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank dapat terus berjalan optimal.

Komposisi *Non Performing Loan* perbankan nasional periode 2012 – 2014 (posisi Desember) dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2
Jumlah NPL Perbankan Nasional Periode 2012 – 2014 (posisi Desember)

Keterangan	Jumlah NPL (dalam milyar Rp)		
	2012	2013	2014
Bank Persero	21.249	22.467	25.643
Bank Swasta	17.448	20.564	33.165
Bank Pemerintah Daerah	5.025	7.444	10.406
Bank Asing	2.667	3.396	2.984
Total	46.389	53.871	72.198

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia, data diolah tahun 2015



Gambar 1.3
Pergerakan DPK Perbankan Nasional periode 2012-2014 (posisi Desember)

Pada tabel 1.2 terlihat, *Non Performing Loan* (NPL) pada perbankan konvensional mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Tercatat untuk bank persero di tahun 2012 NPL sebesar Rp. 21.249 miliar, kemudian meningkat sebesar Rp. 22.467 milyar pada tahun 2013. Pada tahun 2014, NPL kembali meningkat sebesar Rp. 25.643 milyar. Selanjutnya pada bank swasta di tahun 2012 NPL sebesar Rp. 17.448 miliar, kemudian meningkat sebesar Rp. 20.564 milyar pada tahun 2013. Dan di tahun 2014, NPL kembali meningkat sebesar Rp. 33.165 milyar.

Pergerakan data tersebut menggambarkan bahwa risiko kredit macet meningkat tiap tahunnya, peningkatan ini dapat menyebabkan perbankan mencadangkan kerugian dan semakin berhati-hati dalam pemberian kredit kepada masyarakat

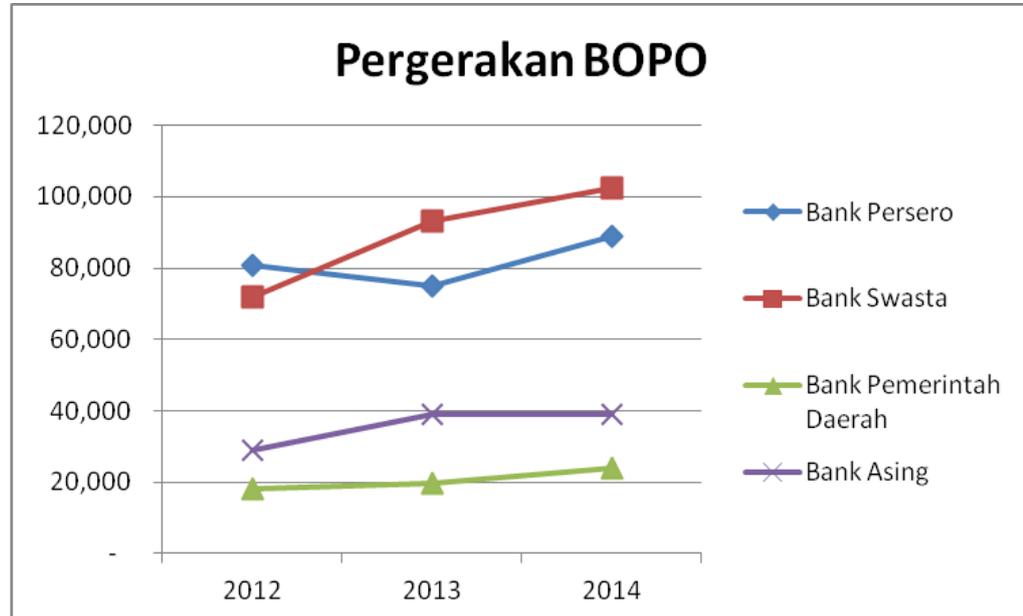
Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank membutuhkan biaya operasional, rasio yang digunakan sebagai proksi terhadap perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional adalah rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi operasi dengan membandingkan total biaya operasional yaitu penjumlahan dari total beban bunga dan total beban operasional lain dengan total pendapatan operasi yaitu penjumlahan dari total pendapatan bunga dan total pendapatan lainnya, hingga dapat menentukan bahwa pendapatan bank dapat menutup biaya operasional.

Komposisi Beban Operasional selain beban bunga perbankan nasional periode 2012 – 2014 (posisi Desember) dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Beban Operasional Perbankan Nasional
Periode 2012 – 2014 (posisi Desember)

Keterangan	Jumlah Beban Operasional (dalam milyar Rp)		
	2012	2013	2014
Bank Persero	80.875	75.030	88.752
Bank Swasta	71.838	93.115	102.351
Bank Pemerintah Daerah	18.181	19.826	23.805
Bank Asing	29.002	38.835	39.181
Total	199.896	226.806	254.089

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia, data diolah tahun 2015



Gambar 1.4

Pergerakan BOPO Perbankan Nasional periode 2012-2014 (posisi Desember)

Pada tabel 1.4 terlihat bahwa beban operasional meningkat disetiap tahunnya. Tercatat untuk total keseluruhan biaya operasional meningkat

sebanyak 26.910 milyar, pada tahun 2012-2013 dan meningkat lagi 27.283 miliar pada tahun 2014-2015.

Jumlah rasio yang semakin meningkat mencerminkan kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan operasionalnya yang dapat menimbulkan kerugian karena bank kurang efisien dalam mengelola usahanya.

Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan. Hal ini dapat dianalogikan apabila biaya operasional yang ditanggung oleh bank dalam menjalankan operasionalnya berjalan secara efisien, maka bank dapat meningkatkan kinerja dalam memperoleh keuntungan dengan cara penyaluran kredit yang lebih berkualitas. Apabila bank tidak mampu menekan biaya operasionalnya, maka bank dikatakan tidak melaksanakan kegiatan operasional secara efisien yang menyebabkan alokasi dana untuk penyaluran kredit menurun.

1.2 Perumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan sesuai dengan pembatasan masalah yang telah ditentukan sebagai berikut:

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap penyaluran kredit bank konvensional?
2. Apakah *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh terhadap penyaluran kredit bank konvensional?

3. Apakah Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap penyaluran kredit bank konvensional?

1.3 Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit pada bank konvensional, sehingga dapat mengetahui faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan kredit itu sendiri. Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan dan kontribusi sebagai berikut :

1. Bagi perbankan

sebagai gambaran dan dapat dijadikan masukan dalam menentukan kebijakan dalam hal penyaluran kredit.

2. Bagi investor

sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dana secara tepat berdasarkan produktivitas bank dalam penyaluran kredit.

3. Bagi ilmu pengetahuan

sebagai referensi dalam hal faktor-faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan kredit, serta sebagai bahan masukan dalam pengembangan teori.